

TAJUK RENCANA

Konsekuensi Sumbu Filosofi

SATU tahun lalu, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengungkapkan bahwa keberadaan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia tidak hanya akan menguatkan nilai-nilai budaya Yogyakarta, tetapi juga akan berpengaruh besar bagi Yogyakarta sebagai Kota Wisata. Sumbu filosofi dimaksud untuk menghubungkan Panggung Krapyak-Kraton Yogyakarta sampai Tugu Pal Putih.

Selain itu, keberadaan Sumbu Filosofi untuk mendukung Pemda DIY dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan eksistensi nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta di tingkat dunia. Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengungkapkan hal itu ketika mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Webinar Peringatan Hari Warisan Dunia 2023 bertema Tantangan Yogyakarta Sebagai Nominator Warisan Budaya Dunia dari Indonesia, 18 April 2023.

Dalam Webinar Peringatan Warisan Dunia 2023 tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Hilmar Farid menyatakan bahwa nominasi Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia (saat itu) sedang memasuki proses pembahasan akhir di UNESCO menuju penetapan. Setelah penetapan oleh UNESCO, akan memiliki banyak konsekuensi terkait dengan upaya-upaya pelestarian Sumbu Filosofi.

Proses panjang pengajuan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia akhirnya membuahkan hasil, ketika pada 24 September 2023 UNESCO dalam sidang di Riyadh Arab Saudi menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia. Selanjutnya, Kamis 24 April lalu, Pemda DIY menerima sertifikat Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sertifikat diserahkan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar

Farid kepada Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X.

Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia bertujuan melestarikan nilai-nilai luhur bagi masyarakat Yogyakarta, bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia. Untuk itu, pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi perlu melibatkan seluruh stakeholder di DIY. Juga warga yang berada di sepanjang Sumbu Filosofi maupun di luar kawasan Sumbu Filosofi.

Seperti diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam berbagai kesempatan, salah satu bentuk keistimewaan kebudayaan DIY adalah tata ruang inti wilayah Yogyakarta yang didasari pada pemahaman filsafat kehidupan manusia yang tinggi dan bernilai luhur. Tata ruang Kota Yogyakarta dimaksud sudah dirancang dan mulai diwujudkan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengku Buwono I saat mendirikan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tata ruang tersebut dilandasi filosofi *sangkan paraning dumadi* serta *golong gilig*. Hal itu seperti yang terlihat dari keberadaan sejumlah bangunan penanda. Inti wilayah Yogyakarta juga ditata berdasarkan filosofi tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam, serta cerminan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghadap Sang Kuasa. Konsep perencanaan dan pendirian Kota Yogyakarta merupakan mahakarya yang tidak ada bandingannya di dunia.

Saat ini, Sumbu Filosofi sudah bersertifikat yang tentunya bukan sekadar pelengkap administratif. Makna sertifikat tersebut lebih dari sekadar selembar kertas. Tantangan dan tanggungjawab pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan Sumbu Filosofi akan semakin besar. Hilmar Farid juga sudah mengingatkan keberadaan Sumbu Filosofi memiliki banyak konsekuensi. Untuk itu, perlu dukungan dari semua pihak. □-d

Perlindungan HKI

Triyana Yohanes

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Membangun masa depan bersama dengan inovasi dan kreativitas. Inovensi-invensi yang dilindungi HKI, khususnya di bidang teknologi, sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Kita tidak bisa membangun



KR-JOKO SANTOSO

tanpa IPTEK. Karena itu akses bagi pemanfaatan berbagai IPTEK modern harus terbuka bagi negara-negara sedang berkembang demi tercapainya tujuan SDGs.

Bagi bangsa Indonesia yang merupakan salah satu negara sedang berkembang dan sedang mengimplementasikan SDGs, peringatan hari HKI dapat kita jadikan momentum untuk melihat kembali pengaturan HKI di Indonesia agar sesuai dengan kepentingan pembangunan Indonesia. Sebagai pelaksanaan berbagai perjanjian internasional di bidang HKI yang diratifikasi Indonesia dan keanggotaan di *World Intellectual Property Organization*, pengaturan HKI Indonesia saat ini lebih menekankan pada aspek perlindungan kepemilikan dan kurang memperhatikan

Hentikan Era Perundungan

Ichsan Y Nuansa

akan dampak perundungan dapat menjadi langkah awal yang efektif. Perubahan ini harus dimulai dari lingkungan pendidikan, tempat di mana nilai-nilai masyarakat ditanamkan pada generasi muda.

Upaya berikutnya pencegahan secara preventif. Beberapa pendapat positif menjelaskan bahwa preventif adalah kunci untuk mengakhiri perundungan. Salah satu gambaran pendekatan tersebut seperti menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan aman di sekolah dan tempat kerja. Sekolah dan instansi apapun perlu mengembangkan kebijakan anti-perundungan yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku perundungan.

Selain itu, pendidikan individu tentang dampak perundungan melalui kampanye sosial dan program edukasi juga direalisasikan. Masyarakat harus terlibat dalam upaya mengubah norma sosial yang memperkuat perundungan. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui diskusi terbuka, pelatihan kesadaran, dan pembentukan kelompok dukungan di tingkat kelurahan atau pun instansi pendidikan.

Langkah-langkah tersebut ditawarkan karena fenomena dampak perundungan bagi seorang korban sangatlah besar. Diketahui dalam sebuah literatur, bahwa korban perundungan akan melalui penderitaan batin, terhina, terabaikan, merasa tidak layak untuk hidup, depresi, hingga ada pada taraf keinginan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri (Sani, 2019). Tinjauan literatur tersebut memberikan dilemma untuk segera melakukan perubahan paradigma. Perubahan paradigma masyarakat diperlukan agar perundungan benar-benar dapat musnah. Kita perlu beralih dari budaya yang membenarkan perilaku perundungan menjadi masyarakat yang menilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Pembentukan

KEMBALI menyeruak kasus perundungan yang terjadi menimpa seorang siswa di salah satu sekolah swasta daerah Serpong. Dilansir pada laman krjogja.com (3/4) korban aksi perundungan ini didapati luka bakar dan memar yang diduga adanya penganiayaan. Berita tersebut menambah catatan kasus perundungan yang menimpa pelajar, bahkan pelakunya merupakan pelajar itu sendiri yang tentunya akan menjadi anak berkonflik dengan hukum (ABH). Perundungan (dikenal sebagai *ipenindasan*/risaki dalam bahasa Indonesia), yakni segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus (Wardhana, 2015). Perundungan, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi masalah yang meresahkan, baik di tempat kerja, lingkungan sekolah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aksi perundungan pasti menimbulkan dampak negatif yang bernapas panjang. Pertanyaannya, kapan perundungan akan musnah? Guna menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat musabab masalah, upaya pencegahan, serta perubahan paradigma yang diperlukan dalam masyarakat.

Sangat krusial untuk memahami akar masalah perundungan agar bisa mengatasi dan mencegahnya. Perundungan tidak sekadar gejala individual, tetapi juga cerminan kondisi sosial dan budaya. Faktor-faktor seperti stereotip, ketidaksetaraan, dan kurangnya pemahaman terhadap keberagaman dapat menjadi pemicu perundungan. Selain itu, kekuasaan yang tidak seimbang dan norma sosial yang membenarkan perilaku perundungan hingga turut memberi kontribusi pada kelangsungan masalah ini.

Sebagai upaya mengakhiri perundungan, sangat perlu menangani akar masalah tersebut. Edukasi yang berpihakan pada keberagaman, pengembangan kecerdasan emosional, dan peningkatan kesadaran

aspek fungsi sosial dari HKI. Hal ini kurang sejalan dengan sifat komunal masyarakat Indonesia yang sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga segala penemuan, keterampilan dan informasi yang dikuasai seseorang seharusnya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama agar bermanfaat bagi orang banyak.

Kenyataan menunjukkan, mayoritas HKI yang dilindungi di Indonesia milik orang atau perusahaan dari luar negeri. Menurut Direktur Paten, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Yasmon, jumlah permohonan paten dari tahun 1991 sampai 2023 didominasi oleh permohonan dari luar negeri, yakni sebesar 81,96% (<https://www.dgip.go.id>). Dengan demikian yang banyak diuntungkan dari pengaturan perlindungan HKI di Indonesia adalah para pemilik HKI dari luar negeri. Hal ini bisa menghambat program pembangunan Indonesia. Banyak produk dibuat di Indonesia terpaksa harus menggunakan HKI asing berdasar perjanjian lisensi dengan royalty tinggi, yang berarti menguras cadangan devisa Indonesia. Karena itu pengaturan HKI Indonesia ke depan seharusnya lebih memperhatikan sifat masyarakat Indonesia yang sosialis dan kepentingan Indonesia sebagai negara sedang berkembang. Aspek kewajiban sosial pemegang HKI, pembatasan hak, pengaturan lisensi dan kewajiban alih teknologi seharusnya diperhatikan dalam pengaturan HKI di Indonesia.***

*) **Dr Triyana Yohanes SH Mhum,**
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkann fotocopy identitas. Terimakasih.

pola pikir inklusif harus dimulai dari keluarga, di mana nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman diajarkan dan diterapkan.

Peran masyarakat dalam hal ini orangtua dan komunitas sangat penting dalam upaya mengakhiri perundungan. Orangtua perlu terlibat aktif dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya menghargai perbedaan dan berperilaku baik terhadap orang lain. Membangun komunikasi terbuka antara sekolah dan orangtua juga dapat meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya pencegahan perundungan.

Selanjutnya, pada tingkat komunitas, organisasi sosial dan keagamaan dapat berperan sebagai agen perubahan. Mereka dapat mengorganisir kegiatan sosial, seminar, atau lokakarya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perundungan dan cara mencegahnya. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas dapat menciptakan efek sinergis yang kuat dalam memerangi perundungan. (*)

*) **Ichsan Y Nuansa Putra MPd Gr,**
guru di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Pojok KR

Harga bawang merah naik dua kali lipat, pemerintah pastikan tidak akan impor.

-- Tidak hanya janji?

Anggota Bawaslu diminta siap menghadapi 296 laporan perselisihan hasil Pemilu.

- Siap-siap saja.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Aam X menerima sertifikat Sumbu Filosofi.

-- Banyak konsekuensinya.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampitio MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Drs Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-gungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP